

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi digital telah menjadi arah penting dalam reformasi administrasi publik karena masyarakat tidak lagi hanya menuntut pelayanan yang tersedia, tetapi juga pelayanan yang cepat, mudah, terdokumentasi, dan mampu memberikan kepastian hasil. Dalam konteks pemerintahan modern, teknologi digital dipandang bukan sekedar alat bantu administratif, melainkan sarana untuk menata ulang proses kerja, menyederhanakan prosedur, mengurangi pengulangan pekerjaan, dan memperkuat orientasi pelayanan pada warga. Sejumlah penelitian mutakhir menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital sektor publik ditentukan oleh kemampuan organisasi publik mengubah proses, budaya kerja, dan relasi dengan pengguna layanan secara lebih berpusat pada warga, bukan hanya dengan mengganti media manual ke media elektronik (Escobar et al., 2023).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada era digital ditentukan oleh kemampuan organisasi publik untuk menata ulang proses kerja, mengurangi tahapan yang berulang, meningkatkan keterhubungan data, dan menciptakan pengalaman layanan yang lebih pasti bagi warga. Kajian terkini menegaskan bahwa transformasi digital yang berhasil harus bergerak dari sekadar digitalisasi teknis menuju layanan yang berpusat pada warga, menghasilkan nilai publik, dan menjaga keseimbangan

antara efisiensi organisasi dan kemudahan bagi pengguna layanan (Kim et al., 2024; Weigl et al., 2024).

Walaupun demikian, optimisme atas transformasi digital tidak menghapus risiko eksklusi digital. Ketimpangan akses internet, variasi literasi digital, kapasitas aparatur yang belum merata, dan kemampuan warga dalam beradaptasi dengan layanan baru masih menjadi tantangan nyata dalam layanan publik digital. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pendidikan, adaptasi pengguna, kualitas layanan elektronik, dan kesenjangan digital berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan, kepuasan, dan manfaat layanan digital yang dirasakan masyarakat (Afzal & Panagiotopoulos, 2024; Taufiqurokhman et al., 2024).

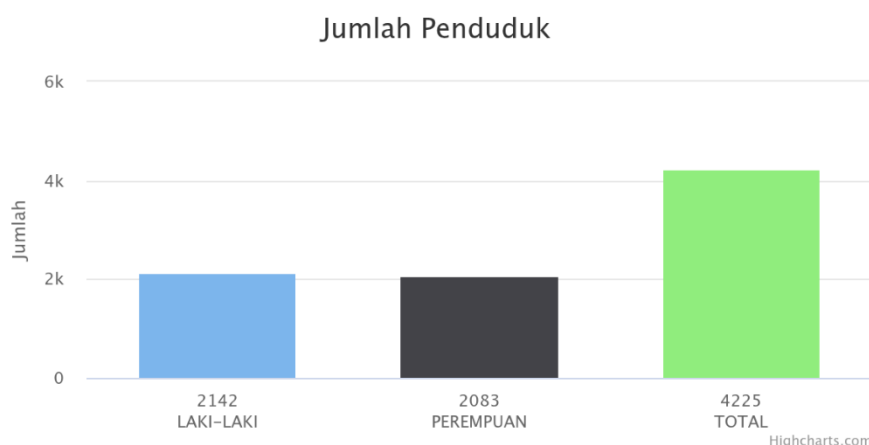
Indonesia memperlihatkan arah kebijakan yang kuat menuju pemerintahan digital. Kementerian PANRB melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat 64 dari 193 negara dalam *United Nations E-Government Survey* 2024 dan untuk pertama kalinya masuk kategori *very high e-government development index*. Pada saat yang sama, hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional tahun 2024 mencapai indeks 3,12 dengan predikat baik. Capaian tersebut penting, tetapi juga menandakan bahwa agenda digitalisasi tidak cukup berhenti pada level nasional dan kementerian; keberhasilan layanan digital harus dibuktikan sampai pada unit pelayanan yang paling dekat dengan warga, termasuk kantor desa (Birokrasi, 2024, 2025; Nations, 2024).

Kabupaten Bojonegoro menunjukkan lingkungan kebijakan yang relatif kondusif bagi pengembangan pelayanan publik berbasis digital. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro mengembangkan SIAP Desa sebagai sistem informasi administrasi pemerintahan desa yang memuat data aparatur desa, produk hukum desa, realisasi APBDes, dan informasi pendukung lain secara terintegrasi. Di bidang administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro juga menyediakan Panah Srikandi sebagai layanan adminduk daring yang dapat diakses secara elektronik. Kehadiran dua instrumen tersebut memperlihatkan bahwa kabupaten telah bergerak dalam kerangka pemerintahan digital, sehingga desa-desa di Bojonegoro berada dalam lingkungan yang mendorong pelayanan yang lebih terdokumentasi dan lebih berbasis data (B. P. S. K. Bojonegoro, 2024; D. K. dan P. S. K. Bojonegoro, 2025; D. P. M. dan D. K. Bojonegoro, 2025).

Desa menjadi arena yang sangat strategis dalam agenda tersebut karena desa merupakan titik temu pertama antara negara dan warga untuk berbagai kebutuhan administrasi dasar. Literatur lima tahun terakhir menunjukkan bahwa digitalisasi desa dapat memperkuat tata kelola lokal, membantu pencatatan data, mempercepat pelayanan, dan memperluas akses informasi desa. Namun, keberhasilan itu tetap dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, desain tata kelola, dan kemampuan sistem untuk menjawab kebutuhan warga secara nyata (Fahmi & Mendrofa, 2024; Misra & Singh, 2024; Sampetoding & Er, 2024).

Dalam lingkungan tersebut, Desa Pekuwon di Kecamatan Sumberrejo merupakan tempat yang relevan untuk dikaji karena kebutuhan pelayanan administrasinya berlangsung secara nyata dan terus-menerus. Berdasarkan data pada Portal Resmi Desa Pekuwon, jumlah penduduk Desa Pekuwon tercatat sebanyak 4.225 jiwa, terdiri atas 2.142 penduduk laki-laki dan 2.083 penduduk perempuan. Desa Pekuwon melayani wilayah empat dusun, empat RW, dan 26 RT serta didukung oleh 12 aparatur desa. Skala layanan tersebut menunjukkan bahwa kecepatan pelayanan, ketepatan data, dan kerapian arsip bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan kebutuhan organisatoris yang langsung berpengaruh pada warga yang mengurus berbagai dokumen administratif di kantor desa (Pemerintah Desa Pekuwon, 2026).

GAMBAR 1
JUMLAH PENDUDUK DESA PEKUWON MENURUT JENIS KELAMIN



Sumber: Portal Resmi Desa Pekuwon 2026.

Kondisi objektif tersebut semakin penting ketika dikaitkan dengan fenomena empiris di lapangan. Berdasarkan observasi awal dan wawancara

pendahuluan yang peneliti lakukan, Desa Pekuwon telah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa (SIMAPDES) sejak tahun 2006. Sistem ini dikembangkan secara mandiri di tingkat desa dan bukan merupakan aplikasi yang berasal dari program kabupaten. Fakta ini memperlihatkan bahwa Pekuwon tidak hanya menjadi pengguna kebijakan digital yang datang dari luar, tetapi juga memiliki pengalaman inovasi lokal yang tumbuh dari kebutuhan administratif desa sendiri (hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan peneliti, 2026).

GAMBAR 2

TAMPILAN SIMAPDES PADA KOMPUTER PELAYANAN DI DESA PEKUWON



Sumber : dokumentasi awal peneliti, 2026

Berdasarkan hasil observasi awal, SIMAPDES di Desa Pekuwon digunakan untuk hampir seluruh pelayanan administrasi surat-menyurat, pelaporan kependudukan, penelusuran data warga berdasarkan usia, serta dukungan administratif untuk penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT) dalam pilkades. Artinya, SIMAPDES tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, tetapi telah menjadi

instrumen kerja utama dalam proses pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat (hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan peneliti, 2026).

Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa SIMAPDES tidak dikelola oleh satu operator khusus. Seluruh perangkat desa dapat mengakses sistem sesuai tugas pelayanan masing-masing, baik melalui komputer maupun telepon genggam. Dari satu sisi, kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi tersebut telah melembaga secara organisasional. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga menuntut konsistensi keterampilan aparatur, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme kerja yang rapi agar kualitas pelayanan tetap terjaga ketika pengguna sistem lebih dari satu orang (hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan peneliti, 2026).

Dari sisi perkembangan, aparatur desa menjelaskan bahwa SIMAPDES pada awalnya berangkat dari kebutuhan inti berupa data kependudukan dan surat-surat dasar, lalu berkembang menjadi sistem yang mencakup lebih banyak jenis layanan administrasi. Kebertahanan penggunaan sejak 2006 sampai sekarang memperlihatkan bahwa SIMAPDES bukan inovasi sesaat, melainkan inovasi lokal yang terus dipertahankan karena dianggap bermanfaat. Dalam perspektif inovasi pelayanan publik, keberlanjutan penggunaan seperti ini penting karena menunjukkan adanya penerimaan, penyesuaian, dan pemaknaan positif oleh pengguna internal (Alfira & Adni, 2024; Johnston & Fenwick, 2024).

Aparatur desa juga menyampaikan bahwa manfaat yang paling terasa setelah menggunakan SIMAPDES adalah pelayanan menjadi lebih cepat, bahkan untuk beberapa jenis surat dapat selesai sekitar satu menit. Sistem ini membantu pencarian data warga hanya dengan menyebutkan nama, membuat arsip lebih rapi, memudahkan rekap administrasi, dan mengurangi pekerjaan tulis ulang yang berulang. Temuan awal ini menunjukkan adanya keuntungan relatif dibanding cara manual dan memperlihatkan potensi SIMAPDES dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Untuk memahami bagaimana SIMAPDES diterima dan dijalankan oleh aparatur desa, penelitian ini menggunakan teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh (Rogers, 2003). Rogers menjelaskan bahwa inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi tertentu. Dalam teorinya, kecepatan dan keberhasilan adopsi suatu inovasi tidak semata-mata bergantung pada kecanggihan teknologi yang ditawarkan, melainkan pada bagaimana calon pengguna menilai karakteristik inovasi tersebut.

Rogers menetapkan lima karakteristik inovasi yang menentukan seberapa cepat dan seberapa luas inovasi diterima, yaitu *relative advantage* (keuntungan relatif), *compatibility* (kesesuaian), *complexity* (kerumitan), *trialability* (kemungkinan untuk dicoba), dan *observability* (kemudahan diamati). Kelima karakteristik ini menjadi lensa analitis yang sangat relevan untuk membaca bagaimana SIMAPDES dimaknai, dijalankan, dan

dipertahankan oleh aparat Desa Pekuwon dalam praktik pelayanan administrasi sehari-hari.

Apabila lima karakteristik Rogers tersebut diarahkan pada temuan awal di Desa Pekuwon, maka akan tampak tiga fenomena lapangan yang secara langsung mencerminkan keunggulan relatif SIMAPDES dibandingkan cara pelayanan manual.

Pertama, dari sisi kecepatan pelayanan, aparat desa menyampaikan bahwa sejumlah jenis surat administrasi dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar satu menit. Kondisi ini merupakan bentuk nyata dari apa yang Rogers sebut sebagai *relative advantage*, yaitu keunggulan yang dirasakan pengguna ketika inovasi mampu memberikan hasil lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien dibandingkan metode sebelumnya. Semakin besar keuntungan relatif yang dirasakan, semakin besar pula kemungkinan inovasi tersebut diadopsi dan dipertahankan (Rogers, 2003).

Kedua, dari sisi pengelolaan data, SIMAPDES memungkinkan aparat desa menelusuri data warga hanya dengan menyebutkan nama, tanpa perlu membuka arsip manual satu per satu. Kemampuan ini menunjukkan dimensi *compatibility*, yaitu kesesuaian sistem dengan kebutuhan kerja aparat yang sehari-hari berhadapan dengan tuntutan pelayanan yang cepat dan data yang akurat. Rogers (2003) menegaskan bahwa inovasi yang selaras dengan nilai, kebiasaan, dan kebutuhan nyata pengguna akan jauh lebih mudah diterima dan diterapkan secara berkelanjutan.

Ketiga, dari sisi keberlanjutan penggunaan, fakta bahwa SIMAPDES telah digunakan sejak tahun 2006 hingga sekarang tanpa dorongan program dari kabupaten merupakan bukti *observability* yang kuat. Rogers (2003) menjelaskan bahwa inovasi yang hasilnya dapat diamati secara langsung oleh pengguna maupun orang lain di sekitarnya akan mendorong keyakinan yang lebih besar terhadap manfaat inovasi tersebut, sehingga keberlanjutan penggunaan pun menjadi lebih terjaga. Ketiga fenomena ini sekaligus menegaskan bahwa SIMAPDES di Desa Pekuwon bukan sekadar alat bantu teknis, melainkan inovasi lokal yang telah menyatu dengan rutinitas kerja aparatur dan terbukti memberikan nilai tambah dalam pelayanan administrasi desa.

Akan tetapi, keberadaan manfaat tersebut tidak berarti bahwa penggunaan SIMAPDES telah berjalan tanpa masalah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, kendala yang paling sering muncul adalah gangguan jaringan dan data warga yang pada sebagian kasus belum lengkap atau belum mutakhir. Ketika dua hal tersebut terjadi, pelayanan dapat melambat, aparatur perlu melakukan pengecekan tambahan, dan masyarakat berpotensi mengalami ketidakpastian waktu penyelesaian layanan. Pada titik inilah kualitas layanan digital sangat ditentukan bukan hanya oleh keberadaan aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan data, dukungan operasional, dan kondisi infrastruktur (Nadhira et al., 2024; Taufiqurokhman et al., 2024).

Kondisi tersebut menjadi titik penting yang membuka celah penelitian yang perlu dijawab secara empiris. Secara ideal, teori difusi inovasi Rogers (2003) menggambarkan bahwa inovasi yang telah diadopsi secara berkelanjutan seharusnya sudah melampaui hambatan-hambatan awal dan berjalan secara konsisten dalam praktik. Namun kenyataan di Desa Pekuwon memperlihatkan bahwa meskipun SIMAPDES telah bertahan selama hampir dua dekade, hambatan operasional seperti gangguan jaringan dan ketidaklengkapan data warga masih muncul dan berpotensi mengganggu kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Belum adanya survei kepuasan formal yang secara khusus menilai pelayanan berbasis SIMAPDES juga memperkuat kebutuhan terhadap penelitian yang lebih sistematis. Tanpa kajian yang mendalam, penilaian terhadap kualitas pelayanan yang dihasilkan oleh SIMAPDES hanya akan bersandar pada asumsi, bukan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara langsung bagaimana inovasi digital SIMAPDES diterapkan, dimaknai, dan berdampak terhadap kualitas pelayanan publik di Desa Pekuwon, dengan menggunakan lima karakteristik difusi inovasi

Rogers sebagai kerangka analisis utama. Bagi masyarakat, kondisi tersebut memiliki implikasi yang nyata. Ketika sistem digital bekerja dengan baik, warga memperoleh pelayanan yang lebih cepat, lebih pasti, dan lebih hemat waktu. Sebaliknya, ketika jaringan bermasalah atau data

belum lengkap, warga dapat mengalami penundaan, kebutuhan datang kembali ke kantor desa, serta ketidakpastian terhadap hasil layanan.

Dari sudut pandang administrasi publik, pengalaman semacam ini berpengaruh pada persepsi keadilan pelayanan, rasa percaya terhadap aparat, dan tingkat kepuasan warga terhadap pemerintah desa sebagai penyelenggara layanan publik (Kim et al., 2024; Taufiqurokhman et al., 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tema digitalisasi desa telah dibahas cukup luas, tetapi pembahasannya masih tersebar pada objek dan penekanan yang berbeda. Novianti & Agustina (2024) menemukan bahwa *Village Information System* membantu pelayanan administrasi desa menjadi lebih cepat dan efisien, meskipun belum optimal karena sosialisasi dan kemampuan pengguna masih berbeda. Setyoningasih & Mursyidah (2024) menegaskan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memengaruhi pelaksanaan layanan digital.

Alfira & Adni (2024) menunjukkan bahwa inovasi berbasis aplikasi digital desa dapat dibaca melalui teori (Rogers, 2003), tetapi penggunaan masih dapat terhambat oleh rendahnya sosialisasi dan keterbatasan sumber daya manusia. Iswanto & Miskan (2025) menyoroti pentingnya kesinambungan pelatihan dan optimalisasi fitur dalam transformasi digital desa, sedangkan Hajar & Arma (2024) memperlihatkan bahwa inovasi digital desa juga berhubungan dengan pembentukan public value. Keseluruhan temuan tersebut memberi dasar yang kuat bahwa digitalisasi

desa penting ditelaah dari sisi sistem, organisasi, dan pengalaman pengguna layanan.

Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih menelaah sistem desa yang lahir dari program yang lebih umum, seperti SID, DIGIDES, PLAVON Dukcapil, atau kerangka *smart village*. Di Desa Pekuwon, konteksnya berbeda karena SIMAPDES tumbuh dari inisiatif lokal desa, digunakan secara berkelanjutan sejak 2006, dan sampai hari ini menjadi alat kerja utama dalam pelayanan surat, pengelolaan data kependudukan, serta dukungan administrasi pilkades.

Kondisi ini membuat Desa Pekuwon tidak hanya menarik dilihat sebagai contoh digitalisasi layanan, tetapi juga sebagai praktik inovasi lokal yang bertahan, berkembang, dan menyatu dengan rutinitas pelayanan desa sehari-hari (Alfira & Adni, 2024; Hajar & Arma, 2024; Iswanto & Miskan, 2025; Novianti & Agustina, 2024; Setyoningasih & Mursyidah, 2024; hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan peneliti, 2026).

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian terhadap SIMAPDES di Desa Pekuwon sebagai inovasi digital lokal yang tidak hanya lahir dari inisiatif desa, tetapi juga telah bertahan dan digunakan secara berkelanjutan dalam pelayanan administrasi desa. Selain itu, penelitian ini menawarkan kebaruan analitis dengan mengkaji SIMAPDES secara integratif dari sisi penerimaan aparatur, proses digitalisasi pelayanan, kendala operasional, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik yang dirasakan warga.

Atas dasar itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada teori difusi inovasi Rogers (2003) khususnya lima karakteristik inovasi yaitu *relative advantage*, *compatibility*, *complexity*, *trialability*, dan *observability*. Fokus tersebut dipilih karena lima indikator tersebut paling tepat untuk membaca bagaimana SIMAPDES diterima, dijalankan, dan dimaknai oleh aparatur desa maupun masyarakat pengguna layanan. Sementara itu, konsep inovasi, SIMAPDES, dan kualitas pelayanan publik tetap digunakan sebagai landasan konseptual untuk memperjelas konteks penelitian dan menghubungkan temuan lapangan dengan praktik pelayanan administrasi desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul “Inovasi Digital SIMAPDES dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro” penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan yang lebih rinci mengenai fenomena penggunaan SIMAPDES di Desa Pekuwon, mempertegas masalah empiris yang sedang dihadapi, sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemerintah desa dalam memperkuat pelayanan administrasi berbasis digital.

B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya suatu penelitian dilakukan berdasarkan tujuan awal yang dimiliki oleh peneliti yaitu untuk memperoleh data yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pemecah masalah yang ada dalam topik penelitian. Setiap penelitian yang ingin dilakukan harus berdasarkan masalah yang telah

ditemukan dalam pencarian informasi awal. Walaupun diakui bahwa masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian (Tuckman, 1988).

Apabila peneliti menemukan masalah, maka dapat dikatakan peneliti telah melaksanakan separuh dari proses penelitian karena telah ditemukan suatu masalah maka peneliti dapat segera dilakukan oleh peneliti dengan lebih mudah. Setelah ditemukan suatu masalah maka penelitian dapat segera dilakukan oleh peneliti dengan lebih mudah.

Jika terjadi penyimpangan yang ada dalam kenyataan pelaksanaan dilapangan sehingga tujuan yang seharusnya dicapai tidak terealisasi maka keadaan tersebut dapat disebut suatu masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya mengenai penerapan sistem digital dalam pelayanan administrasi desa, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana penerapan inovasi digital melalui Sistem Informasi administrasi Pemerintah Desa (SIMAPDES) dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Desa Pekuwon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan

memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan inovasi digital melalui Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa (SIMAPDES) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Pekuwon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian, guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan di dalam topik penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan harapan menghasilkan informasi yang rinci, akurat dan aktual yang dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu administrasi publik, terutama pada kajian inovasi pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan desa, dan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memahami penerapan Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa (SIMAPDES) sebagai bentuk inovasi digital di tingkat desa. Melalui penelitian ini, teori difusi inovasi yang dikemukakan Rogers dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu inovasi diterima, dijalankan, dan

dimanfaatkan dalam konteks pelayanan administrasi desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik mengenai hubungan antara inovasi digital desa dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik sejenis.

b. Secara Praktis.

- 1) Bagi Pemerintah Desa Pekuwon : Dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan, dan evaluasi bagi Pemerintah Desa Pekuwon dalam meningkatkan penerapan Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa (SIMAPDES) pada pelayanan administrasi desa. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi kelebihan, kendala, dan kebutuhan pengembangan sistem, sehingga penggunaan SIMAPDES dapat lebih optimal dalam mendukung pelayanan publik yang cepat, tertib, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
- 2) Bagi Masyarakat Desa Pekuwon : Memberikan manfaat tidak langsung bagi masyarakat Desa Pekuwon melalui dorongan perbaikan kualitas pelayanan administrasi desa. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat semakin mudah diakses, lebih cepat dalam proses penyelesaian, lebih jelas dalam prosedur, serta lebih memberikan kepastian hasil pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan pelayanan administrasi desa yang lebih baik dan lebih sesuai dengan harapan mereka.

- 3) Bagi perguruan tinggi : Menjadi tambahan referensi akademik dan bahan kajian ilmiah bagi perguruan tinggi, khususnya dalam pengembangan ilmu administrasi publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya bahan pembelajaran, diskusi, dan pengembangan kajian yang berkaitan dengan inovasi digital desa, sistem informasi pemerintahan desa, serta kualitas pelayanan publik, sehingga dapat mendukung penguatan wawasan akademik di lingkungan perguruan tinggi
- 4) Bagi peneliti selanjutnya : Bahan rujukan, referensi, dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik yang berkaitan dengan inovasi digital, sistem informasi administrasi pemerintahan desa, dan kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain dalam memahami konteks penelitian yang serupa, sekaligus menjadi dasar untuk mengembangkan penelitian lanjutan dengan fokus, pendekatan atau lokasi yang berbeda.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan Dalam penulisan penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan agar dapat memudahkan pembaca dalam menguraikan objek penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini, maka susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang didalamnya menguraikan isi berupa latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan dalam keseluruhan isi skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tinjauan pustaka yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian. Selanjutnya, dijelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi teori difusi inovasi, inovasi, SIMAPDES, dan kualitas pelayanan publik. Pada bagian akhir bab ini juga disajikan fokus penelitian yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian di lapangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Uraian pada bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, fokus penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data, Bab ini disusun untuk menjelaskan cara peneliti memperoleh, mengolah, dan menganalisis data agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah.

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi bab hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut dianalisis dan dibahas berdasarkan fokus penelitian serta dikaitkan dengan teori yang digunakan, khususnya teori difusi inovasi dalam melihat

penerapan SIMAPDES dalam pelayanan publik di Desa Pekuwon.

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pihak-pihak terkait, sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan pelayanan publik melalui SIMAPDES di Desa Pekuwon.